

Pentingnya Irian Barat Bagi Indonesia

Dina Ulayani Harahap¹, Henry Susanto², Marzius Insani³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

E-mail : Dinaulayaniharahap22@yahoo.co.id

Abstract: The Importance Of West Irian

For Indonesia. Historically, Indonesia was a former colony of the Dutch East Indies or the former Dutch East Indies. The issue of West Irian as a continuation of the dispute between Indonesia and the Netherlands officially only arose at the end of 1949. At the time, Indonesia was making vigorous efforts to find a way out through negotiations to resolve political disputes between the two sides, by the intercession of the United Nations (UN). The research method used in this study is, History research method, as for the stages of Historical research, namely, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The data analysis techniques used are historical data analysis techniques. Using documentation and library data collection techniques. A dispute with the Dutch Colonial Government as a result of the colonialist's appetite to occupy Indonesian territory was resolved in the Hague through the round table conference in 1949 which resulted in Dutch recognition of Indonesia's sovereignty and independence. However, in the conference there is still an unresolved issue, namely the status of West Irian. The purpose of The Liberation Of West Irian from Dutch neo-capitalists was Sukarno did not want to be indifference again if West Irian was freed and became the henchman of the liberal capitalist imperialist state that Sukarno considered could harm the existence of the Republic Of Indonesia social democratic state at that time.


Keywords: West Irian, Strategy, Profit, Loss.

Abstrak: Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda atau wilayah eks Hindia Belanda.

Masalah Irian Barat sebagai kelanjutan sengketa antara Indonesia dan Belanda

secara resmi baru timbul pada akhir tahun 1949. Pada masa itu justru Indonesia sedang melakukan usaha-usaha yang giat untuk mencari jalan keluar melalui perundingan untuk memecahkan sengketa politik antara kedua belah pihak, dengan perantaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data historis. Menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan. Persengketaan dengan pemerintah kolonial Belanda sebagai akibat dari nafsu penjajah untuk menduduki wilayah tanah air Indonesia, telah diselesaikan di Den Haag melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. sekalipun demikian, didalam konferensi itu masih ada persoalan yang belum terselesaikan yakni status Irian Barat. Tujuan dari Arti Pentingnya Irian Barat bagi Indonesia adalah Soekarno tidak mau jika Irian Barat di merdekakan dan menjadi antek negara imperialis liberal kapitalis yang dianggap Soekarno dapat membahayakan eksistensi Republik Indonesia negara sosial demokrat pada saat itu.

Kata Kunci: Irian Barat, Strategi, Keuntungan, Kerugian

 © 2022 JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

PENDAHULUAN

Proses masuknya Irian Barat ke dalam NKRI tidak terlepas dari berbagai persoalan dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yang pada saat itu masih menguasai Irian Barat (Papua). Dalam perjuangan guna mencapai tujuan masing-masing pihak, beberapa perundingan pun telah dilalui antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada suatu perundingan yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (1949) hingga sampai kepada *New York Agreement* (1962) yang menjadi titik terang Irian Barat masuk ke Indonesia.

Strategi yang dilakukan oleh Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, diawali melalui perundingan-perundingan langsung, tetapi Belanda tetap tidak menyerah. Pada tahun 1954, masalah Irian Barat dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diplomat Amerika, Elsworth Bunker, mengusulkan ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1961 agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada bangsa Indonesia. ditetapkan pula bahwa pasukan PBB akan tinggal di Irian Barat selama satu sampai dua tahun. Indonesia setuju dengan catatan bahwa PBB kelak harus mengurangi masa transisi menjadi dua tahun. Namun Belanda mengusulkan sebaliknya, mereka ingin mendirikan Negara Papua Merdeka begitu PBB meninggalkan Irian Barat. Sebagai balasan usulan itu, Indonesia harus melakukan strategi kedua dengan menggunakan kekuatan militer agar Irian Barat tetap dimenangkan oleh Indonesia.

Pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Sukarno bersifat konfrontatif yang lebih mengarah pada

negara-negara kapitalis, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Politik luar negeri Indonesia juga menjadi lebih militan, dikarenakan saat itu Indonesia menentang keras adanya nekolim, yakni imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Politik Sukarno pada saat itu berfokus seputar masalah Irian Barat dan anti imperialisme. Jika Irian Barat masuk kedalam Indonesia pada saat itu, Irian Barat tidak akan menjadi antek negara imperialis liberal kapitalis lagi, sehingga Indonesia memiliki keuntungan dalam bidang politik jika Irian Barat dimenangkan oleh Indonesia.

Irian Barat merupakan suatu bagian dari Indonesia dan ketidaksediaan pemerintah Belanda untuk tidak menghentikan pendudukannya yang tidak berdasarkan hukum atas wilayah tersebut, maka daerah Irian barat tidak ikut serta untuk menikmati status kemerdekaan bersama-sama dengan wilayah Indonesia yang lainnya. Kehadiran Kolonial Belanda di Irian Barat mengubah ekonomi menggunakan *setting* pasar, melalui pembangunan industri pertambangan dan perkebunan. Sejumlah orang Irian Barat sudah dipekerjakan pada perusahaan pertambangan tersebut. Namun, gejolak politik yang terjadi pada Irian Barat tidak memberikan perubahan yang berarti dalam kehidupan ekonomi orang Irian Barat. Selain itu, industri pertambangan dan perkebunan tidak mampu menyentuh aspek ekonomi masyarakat Irian Barat yang hidup dari berburu, meramu, petani ladang di belantaran hutan Irian Barat. Komersialisasi yang berlangsung di Irian Barat pada saat kolonial hanya menyentuh kalangan atas, pemilik modal, dan kolonial (Akhmad, 2003:16).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

Journal of Social Science Education
Vol. 3, No 2 (2022) 152-160

penelitian historis. Penelitian historis sendiri menurut Nugroho Notosusanto adalah “Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis”(Notosusanto, 1984).

Selanjutnya Nugroho Notosusanto membagi penelitian sejarah ke dalam empat langkah yaitu Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber data. Kritik, yaitu menyelidiki keaslian dan keabsahan sumber-sumber data yang di dapat. Interpretasi, yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data yang telah di kritik menjadi satu kesatuan agar menerangkan objek penelitian. Historiografi, yaitu tahap penulisan hasil penelitian (Notosusanto, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Wilayah Irian Barat

Irian Barat termasuk daerah beriklim tropis yang terletak membujur sepanjang pantai Laut Teduh, sejajar dengan garis khatulistiwa di pantai utara. Pulau Irian termasuk salah satu pulau terbesar di permukaan bumi disamping Greenland di Kutub Utara, Madagaskar, dan Kalimantan yang luasnya mencapai 850 ribu kilometer persegi, sedangkan wilayah Irian Barat dari garis 141 bujur Timur adalah seluas 413 ribu kilo meter persegi yang berarti tiga kali seluas pulau Jawa (132 kilo meter persegi), dan 22 persen dari luas seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 1,9 juta kilo meter persegi.

Bagian tengah dari daerah Irian Barat terdiri dari pegunungan yang tinggi

dan lereng-lereng yang terjal serta lembah-lembah yang luas beberapa diantaranya mempunyai ketinggian lebih dari 16.000 kaki dengan puncak yang ditutupi salju. Daerah-daerah yang lebih rendah ditutupi hutan tropis yang sangat lebat disebabkan jatuhnya hujan yang banjak dengan curah hujan rata rata 3.000 - 4.000 milimotor setahun , dan sebagian besar daerah itu terdiri tanah - tanah rawa . Oleh karena jarangny penduduk yang ditaksir sekitar 994.754 orang yang berarti kepadatan penduduk hanyalah 2 orang setiap kilo meter persegi, maka 80 persen dari wilayah Irian Barat masih merupakan hutan belantara yakni seluas kl.31.000.000 HA .Dari hutan seluas 31 juta hektar diatas , maka seluas 750 ribu hektar sudah dapat dieksploitir segera jika prasarana memungkinkan, sedangkan dari jenis-jenis kayu diatas yang sudah dieksploitir barulah jenis Intsia (Merbau) Pomctia (Matoa) dan Agathis (Damar) yang disamping kayunya, getah nya pun merupakan hasil- sampingan yang dapat diekspor , Sumber- sumber mineral belum dipelajari dengan intensip, sekalipun sudah ada sedikit sumber minyak tanah, endapan tembaga dan nikel yang kiranya akan mempunyai arti komersiil kelak kemudian hari Begitupun hasil -hasil laut masih dalam tarap penelitian (Ismail, 1971:3)

Irian Barat terletak pada pertemuan Samudera Indonesia dengan Samudera Pasifik. Dengan demikian Irian Barat merupakan pos terdepan bagi Indonesia di ” *Pacific Area*” . Setiap perubahan perimbangan kekuasaan (*balance of power*) didaerah Pasifik akan langsung meminta perhatiannya. Kemungkinan akan terganggunya keseimbangan

kekuatan itu tetap ada. Ketiga super-power yang ada di dunia, Amerika Serikat, Soviet Uni dan RRT adalah negara-negara yang langsung mempunyai kepentingan di Pasifik. Sedangkan bagi Jepang, Philipina, Australia dan New Zealand keadaan di Pasifik berpengaruh langsung kepada kehidupannya. Bukan tidak mungkin "*Pacific Area*" itu menjadi satu "*trouble spot*" dikemudian hari. Maka Indonesia sebagai salah satu negara Pasifik tentu harus aktif mengamati perkembangan disekitarnya dan membuat persiapan jangka panjang (Ismail, 1971:4).

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Irian Barat

Menurut perkiraan, sekitar 1.000.000 (satu juta) orang penduduk Irian Barat banyak yang belum tercatat karena tempat tinggalnya belum diketahui. Sekitar 200 suku bangsa hidup terpisah satu sama lain karena keadaan alam dan bahasa yang berbeda-beda. Mayoritas penduduk yang belum memiliki tempat tinggal tetap, mereka masih berpindah-pindah tempat tinggal sembari mencari hasil dengan berburu, penangkapan ikan, mengumpulkan sagu, dan buah-buahan dari hutan. Sedangkan yang telah memiliki tempat tinggal yang tetap, mereka mengusahakan pertanian dengan menanam berbagai jenis ubi, talas, pisang, dan lainnya serta beternak babi dengan cara yang masih sangat sederhana. Bagi mereka yang telah memiliki tempat tinggal yang tetap, mereka dianggap sudah maju namun masyarakat dan perekonomiannya masih tertutup.

Hubungan antar suku saat itu masih sukar dilakukan karena hambatan alam. Keadaan terisolir dan keadaan sosial-ekonomi yang masih buruk

tentu mempunyai pengaruh yang buruk pula kepada kesejahteraan serta tidak dapat mengikuti perkembangan di luar daerahnya masing-masing. Pemeliharaan kesehatan kurang sama sekali, banyak penduduk yang menderita penyakit malaria, beri-beri, frambusia (patek), cacangan, TBC dan sebagainya. Angka kematian paling banyak terjadi pada kalangan laki-laki karena terbunuh dalam perang antar suku yang sering terjadi. Faktor-faktor ini yang menyebabkan penambahan penduduk sangat lambat (Ismail, 1971:3).

Ekonomi Irian Barat bersifat dualistik, yakni terdiri dari daerah pantai yang sudah mengenal mata uang dan daerah pedalaman yang belum mengenal mata uang. Lebih dari sepertiga penduduk yang tinggal di daerah pedalaman yang belum mengenal mata uang, mereka hidup dari penanaman umbi-umbian, pengumpulan hasil hutan, berburu dari beberapa tempat perkebunan sayur mayur serta menangkap ikan. Meninjau perkembangan perekonomian Irian Barat khususnya di daerah yang sudah mengenal mata uang dibagi menjadi dua periode, periode pertama pada tahun 1950 sampai tahun 1962 atau sampai dengan akhir Pemerintahan UNTEA dan periode kedua pada tahun 1963 sampai sekarang.

Pada periode pertama, perekonomian Irian Barat saat itu mencapai "impor-surplus" yang sangat besar, yakni sebesar US \$35 dolar per kapita, yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi Pemerintah Belanda yang saat itu lebih banyak dipergunakan untuk keperluan konsumsi daripada keperluan investasi. Pada periode kedua, adanya pengurangan aktivitas yang disebabkan karena terlambatnya

pemerintah melakukan perubahan kurs IBRP terhadap kecepatan perkembangan inflasi di daerah Indonesia lainnya. Sekalipun salah satu maksud mengadakan karantina ekonomi moneter di Irian Barat untuk membendung inflasi, dan tidak mengganggu perekonomian Irian Barat, tetapi pada kenyataannya karantina moneter merupakan bumerang yang mengakibatkan timbulnya pelarian barang dari Irian Barat ke daerah Indonesia lainnya (*Asset Flight*) yang tidak mudah dibendung (Anonim.1971:67).

3. Kondisi Politik Irian Barat

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin banyak diwarnai akan pengertian diplomasi revolusioner dan radikal. Diplomasi seperti itu ditunjukkan dalam sifat ofensif demi menuntut hak kemerdekaan penuh Indonesia terutama pada masalah Irian Barat. Sifatnya yang ofensif juga ditunjukkan dalam upaya-upaya menghapuskan imperialisme dan kolonialisme demi mewujudkan perdamaian dunia yang bebas dari penjajahan (Sumarti.2014:161).

Hal tersebut dapat dicermati melalui upaya-upaya pembebasan Irian Barat dari perjuangan diplomasi dan militernya. Tanpa perjuangan militer yang berarti dalam hal ini adalah hubungannya dengan TRIKORA, Indonesia tak akan mampu membebaskan Irian Barat dari pembentukan negara Papua oleh Belanda. Hal tersebut nampak jelas bahwa Belanda mencoba menancapkan kolonialismenya di tanah Papua, namun Indonesia tidak tinggal diam demi kesatuan dan tuntutan akan kemerdekaan penuh Indonesia menggunakan dua jalan diplomasi dan militer demi membebaskan Irian Barat.

Menurut Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, bahwa sebagian besar dari pada kebijakan politik luar negeri saat itu berputar disekeliling perjuangan diplomatik yang berhubungan dengan pembebasan Irian Barat. Selain soal kebijakan luar negeri, maka dalam negeri ada sebagian pula masuk pada kebijaksanaan pemerintah untuk mengajukan dan melaksanakan supaya tercapai tujuan dan tuntutan rakyat agar memasukkan wilayah Irian Barat kembali kepada pangkuan Ibu pertiwi Republik Indonesia. Hal ini seperti ucapan Sukarno pada saat itu bahwa kolonialisme tidak benar-benar hilang, tapi kolonialisme semakin memuncak dan semakin erat persatuannya, walau mereka sebagai pihak pemenang Perang Dunia II pernah menyatakan supaya dunia disusun atas asas demokrasi dan anti kolonialisme (Arsip Nasional Republik Indonesia).

4. Pentingnya Irian Barat Bagi Indonesia

Irian Barat adalah daerah yang sangat terbelakang. Sukarno saat itu sangat menyadari akan potensi Irian Barat secara ekonomi. Menurut laporan tim geologinya. Sukarno mengatakan bahwa Irian Barat kaya akan minyak bumi dan Uranium. Menurut Sukarno, Uranium yang saat itu berharga tinggi sudah nyata sekali pihak Belanda di Irian Barat ialah untuk mengambil kekayaan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mempunyai alasan ekonomis untuk menuntut kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik. Selain alasan ekonomis, alasan lainnya yaitu keamanan dan prinsip anti-kolonialisme.

Dari segi keamanan, keberadaan Belanda di Irian Barat ibarat pisau

belati yang mengarah kepada Indonesia. Keberadaan Belanda melambangkan kekuasaan koloni yang masih bergentayangan. Itulah sebabnya ketika konflik Irian Barat kian memuncak Sukarno bertekad untuk membebaskan Irian Barat dengan cara apapun. Selain itu Sukarno berani menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat. Sukarno memahami jika Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik dan niscaya akan mengancam kedaulatan Indonesia yang baru tumbuh.

5. Keuntungan Irian Barat Menjadi Bagian Indonesia

5.1 Segi Ekonomi

Irian Barat memiliki sumber-sumber mineral yang kaya seperti sumber minyak tanah, endapan tembaga, minyak bumi, nikel, uranium, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Sukarno bahwa telah dilakukan penelitian yang mutakhir terhadap Irian Barat yang menghasilkan bahwa Irian Barat memiliki kekayaan akan minyak bumi yang mengandung uranium. Kandungan uranium tersebut memiliki harga yang sangat fantastis pada saat itu sehingga dapat menompang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kekayaan yang dimiliki Irian Barat tentu mempunyai arti yang komersial jika dikelola dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi Negara Republik Indonesia.

5.2 Segi Politik

Irian Barat tidak dimerdekakan oleh negara lain dan menjadi antek atau diperalat oleh negara imperialis, liberal, kapitalis yang dianggap Sukarno dapat

membahayakan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara sosial demokrat pada saat itu.

6. Resiko Atau Gagal Dalam Pembebasan Irian Barat

6.1 Segi Ekonomi

Belanda saat itu masih gigih mempertahankan Irian Barat sebagai tempat kedudukannya karena kekayaan alam yang dimiliki wilayah Irian Barat walau Indonesia saat itu telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Jika upaya pembebasan Irian Barat gagal, maka kekayaan alam Irian Barat tidak bisa menjadi aset sebagai sumber pendapatan Negara Indonesia.

6.2 Segi Politik

Menjadi alat politik Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia terutama di Irian Barat karena adanya pemberian hak kepada Belanda untuk tetap mengontrol Irian Barat selama satu tahun, serta ada penundaan penyelesaian sengketa Irian Barat yang dipandang merugikan posisi politik Indonesia dan berdampak pada hilangnya momentum untuk menuntaskan persoalan kolonialisme.

7. Strategi Perjuangan Pembebasan Irian Barat

7.1 Perjuangan Diplomasi

Pada 17 Agustus 1954, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat kepada sekjen PBB yang isinya meminta agar sengketa Irian Barat diagendakan dalam sidang umum PBB IX September 1954. Keadaan ketika itu menghendaki harus mengambil keputusan yang tepat, karena sebelum akhir tahun 1949 penyerahan kedaulatan harus sudah selesai, sedang Belanda ketika itu membangkang dan tetap mempertahankan, bahwa Irian Barat yang mempunyai status khusus, harus

ditangani secara khusus pula. Sementara perjuangan diplomasi berjalan dan pembicaraan-pembicaraan diadakan, sementara itu pula Belanda melakukan aksi sepihak tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan Indonesia ataupun menanyakan langsung kepada penduduk Irian itu sendiri, Belanda secara resmi telah memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda dengan persetujuan Parlemen Belanda pada pertengahan bulan Agustus 1952 (Anonim, 1988:38).

Usaha-usaha diplomasi yang telah dilakukan oleh pihak Republik Indonesia dibagi menjadi tiga tahap, yaitu ;

1. Tahap I tahun 1950-1952

Kabinet Natsir mendekati Pemerintah Belanda untuk merundingkan penyelesaian soal Irian Barat. Namun hal tersebut gagal karena sikap keras kepala dan angkuh dari pihak Belanda dengan memperkuat pertahanan militer mereka di Irian Barat. pada tahun 1952 Belanda memasukkan Irian Barat kedalam wilayah Kerajaan Belanda dengan merubah konstitusi tanpa merundingkannya terlebih dahulu dengan Republik Indonesia ataupun menanyakan pendapat penduduk Irian Barat sendiri (Ismail.1971:75). Tindakan sepihak ini tentu sangat mengecewakan pihak Indonesia dalam meneruskan usaha diplomasi.

2. Tahap II tahun 1954

Pada masa kabinet Ali, Indonesia meminta perhatian dunia internasional terhadap masalah Irian Barat. Oleh sebab itu diadakan KMB atas prakarsa PBB, tentu dunia Internasional harus turut mengetahui perkembangan selanjutnya. Masalah Irian Barat diperdebatkan disidang Umum PBB ke IX. Akan tetapi karena pengaruh Belanda, tidak mencapai mayoritas suara sebanyak 2/3, maka tidak

tercapai suatu keputusan. Menghadapai kenyataan ini pihak Indonesia tidak mau mundur memperjuangkan tuntutannya. Bangsa Indonesia mengerti, bahwa tidak mungkin menang di forum Internasional, jika tidak dibantu oleh Negara-negara yang bersimpati kepadanya. Oleh karena itu, selain di sidang-sidang PBB, masalah Irian Barat dikemukakan juga pada konferensi-konferensi Internasional lainnya. Seperti di Konferensi Panca Negara di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dihadiri oleh Perdana Menteri dari lima negara jaitu : India, Pakistan, Burma, Sialan dan Indonesia. Komunikasi bersama yang dikeluarkan setelah Konferensi itu selesai antara lain, Para Perdana Menteri, dalam hubungan ini sikap mereka terhadap Kolonialisme yang sudah terkenal itu, memperhatikan soal Irian Barat Para Perdana Menteri Burma, Sialan, India dan Pakistan mendukung pendirian Indonesia.

3. Tahap III 1955-1956

Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955, Permasalahan Irian Barat kembali dibicarakan pada sidang umum PBB ke X. Akan tetapi usaha tersebut gagal karena pengaruh wakil-wakil imperialis di PBB masih besar. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas yaitu membubarkan status Uni dengan Belanda secara sepihak (unilateral) pada tanggal 15 Februari 1956. Tindakan lebih drastis dan revolusioner terjadi pada tahun 1956 saat kabinet Ali Sastroamidjoyo memimpin yaitu dengan membatalkan persetujuan KMB, termasuk segala segi politis, finasiil-ekonomis, dan lainnya, seolah-oleh KMB tidak pernah ada.

7.2 Perjuangan Dibidang Persenjataan

Pada tanggal 19 Desember 1961 diumumkan Komando Pembebasan Irian Barat di Yogyakarta, yang dikenal dengan sebutan nama Tri Komando Rakyat atau

Journal of Social Science Education
Vol. 3, No 2 (2022) 152-160

TRIKORA sebagai bukti nyata bahwa Republik Indonesia bersungguh-sungguh dalam tuntutananya. Ribuan pemuda mendaftarkan diri sebagai Sukarelawan Pembebasan Irian Barat. Presiden/Panglima Tertinggi APRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk suatu Komando Mandala.

Tugas Komando Mandala ialah sebagai berikut :

- 1..Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan dibidang diplomasi, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya wilayah Irian Barat dapat secara de facto menciptakan daerah-daerah bebas dan atau didudukkan unsur-unsur kekuatan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.

7.3 Referendum

Irian Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah. Masuknya Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia merupakan hasil kesepakatan perjanjian yang di mediasi oleh PBB, adapun perjanjian itu dikenal dengan perjanjian New York (*New York Agreement*) pada tanggal 15 agustus 1962 yang di akhiri dengan penentuan pendapat rakyat (PEPERA). Berpatokan pada hasil perjanjian di atas sebagai Hukum Internasional, dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya Barat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka dari itu di lakukanlah jajak pendapat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Irian Barat pada tahun 1969. Namun ada beberapa hal yang menjadi

kendala dalam proses pelaksanaan PEPERA yang dikarenakan letak pemukiman masyarakat Papua yang pada saat itu yang masih banyak berada di daerahdaerah terisolasi atau pedalaman dan di tambah pula dengan keadaan sumber daya manusia yang masih banyak belum mengenal kemampuan baca tulis, sehingga alasan itu dikhawatirkan dapat mempersulit ataupun nantiknya dapat menghambat proses pelaksanaan PEPERA.

PENUTUP

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pertikaian Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat bermula pada persetegangan antara keduanya yang ingin memiliki wilayah kekuasaan irian barat. Terdapat alasan ekonomis bagi Indonesia untuk menuntut kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selain daripada kekayaan minyak buminya terdapat pula dua alasan untuk Indonesia menuntut kembalinya Irian Barat yaitu alasan keamanan dan adanaya prinsip anti Kolonialisme. Pertama jika dilihat dari segi keamanannya keberadaan Belanda di Irian Barat diibaratkan seperti pisau belati yang mengarah kepada Indonesia. Kedua dari segi antikolonialismenya yaitu keberadaan Belanda di Irian Barat dapat dilambangkan adanya kekuasaan koloni yang dirasakan di Irian Barat. Hal demikianlah yang menyebabkan Sukarno bertekad untuk melakukan pembebasan Irian Barat dengan cara apapun terjadi konflik di Irian Barat yang semakin memuncak tersebut.

Kerugian jika Irian Barat di kuasai oleh Belanda Dalam segi ekonomi dapat dikatakan bahwa Sumber daya alam dan terutama sumber daya mineral seperti sumber minyak tanah, endapan tembaga, logam, emas, dan nikel yang kiranya akan mempunyai arti komersial dikemudian

hari tidak bisa menjadi aset sebagai sumber pendapatan Negara Indonesia. Dan Jika Irian Barat masuk kedalam Indonesia maka dalam segi ekonomi dapat membantu sumber pendapatan Negara Indonesia Begitupun hasil-hasil lautnya yang ada di Iian Barat masih dalam tarap penelitian.

Dilihat dalam Segi Politik jika resiko gagal dalam pembebasan Irian barat ialah masalah Irian Barat dipandang merugikan posisi politik Indonesia. Penundaan ini berdampak pada hilangnya momentum untuk menuntaskan persoalan kolonialisme. Dan Keuntungan dalam segi politik jika Irian Barat Masuk ke Indonesia adalah Sukarno tidak mau kecolongan lagi dan keduluan jika Irian Barat di merdekakan dan menjadi antek negara imperialis liberal kapitalis yang dianggap Sukarno dapat membahayakan eksistensi Republik Indonesia negara sosial demokrat pada saat itu.

Strategi Pembebasan Irian Barat yang ditepuh Indonesia ialah yang pertama melalui jalur Diplomasi kemudian jalur diplomasi gagal, selanjutnya Indonesia tidak putus asa untuk tetap memperjuangkan Irian Barat sehingga dibuat Strategi perjuangan melalui Persenjataan, namun dalam perjuangan persenjataan masih juga gagal sehingga Indonesia melakukan perjuangan melalui Referendum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, P. S. 2003. *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua: Amber And Komin: The Studi of Economic Transformation in Papua. Sosiohumanika (16/B), 16(2003).*
- Ismail, A. 1971. *Irian Barat dari masa ke masa (Vol.1).* Sedjarah Militer KODAM XVII/Tjenderawasih. Halaman 3,4,dan 75.
- Korwa, R. (2013). Proses integrasi Irian Barat

- ke dalam NKRI. *Jurnal Politico*, 2(1).
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer.* Jakarta: Inti Indayu. Halaman 11 dan 17.
- Yudiawan, A., Sunarso, B., & Sari, F. (2021). Successful Online Learning Factors in COVID-19 Era: Study of Islamic Higher Education in West Papua, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(1), 193-201.
- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969: the anatomy of betrayal.* Routledge.
- Bell, I., Feith, H., & Hatley, R. (1986). The West Papuan challenge to Indonesian authority in Irian Jaya: Old problems, new possibilities. *Asian Survey*, 26(5), 539-556.
- Gietzelt, D. (1989). The Indonesianization of West Papua. *Oceania*, 59(3), 201-221.
- Sunarti, L. 2014. *Politik Luar Negri Malaysia Terhadap Indonesia 1957-1976 dari konfrontasi menuju kerjasama.* Susulgalur. 2(1). Halaman 161.

Arsip Nasional

- Undang-Undang No 23 Tahun 1958 tentang penetapan “*Undang-Undang Darurat No 20 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Irian Barat* (Lembar Negara Tahun 1957 No 76) sebagai Undang-Undang. 17 Juni 1958. (No 246). Halaman 92.